



Jurnal Kultur Demokrasi

<https://jips.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/manager>

E-ISSN: 2746-2749

Volume 15, No 1, Juni 2026

DAMPAK DISINFORMASI PADA KEHIDUPAN BERNEGARA DAN URGENSI PENGUATAN LITERASI DIGITAL

¹citra ayu karima r, ²carel lando peranggi, ³mulan nayala r, ⁴salsa relanita, ⁵aulia syifa
r, ⁶kharisma yogi pratiwi, ⁷shakila nesya maharani

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Lampung
e-mail: citraayukarina@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena krisis literasi digital dan informasi, menganalisis faktor penyebab rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi, mengetahui dampak disinformasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengidentifikasi upaya penguatan literasi digital, khususnya bagi generasi muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dan observasi melalui penyebaran angket kepada 31 mahasiswa Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari pentingnya literasi digital, etika bermedia sosial, dan kemampuan memverifikasi informasi. Sebanyak 64,5% responden menilai penerapan aturan hukum yang tegas dan adil sebagai langkah utama dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Sebanyak 48,4% responden menyatakan materi literasi digital sangat penting untuk dimasukkan dalam kurikulum perkuliahan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa berita palsu dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu konflik sosial, serta melemahkan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila ketiga. Faktor sensasional dan emosional dalam judul berita menjadi salah satu penyebab masyarakat menyebarkan informasi tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Penguatan literasi digital dapat dilakukan melalui pendidikan etika digital, pembiasaan berpikir kritis, internalisasi nilai-nilai Pancasila, pelatihan literasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan platform media sosial. Literasi digital yang kuat diharapkan mampu membentuk warga negara yang kritis, bijak, bertanggung jawab, serta mampu menjaga persatuan, demokrasi, dan ketahanan nasional di era digital.

Kata kunci: literasi digital, disinformasi, hoaks, Pancasila, kewarganegaraan, era digital.

Abstract

The development of digital technology has provided convenience in accessing and disseminating information, but it has also created challenges in the form of hoaxes, disinformation, hate speech, and limited public ability to verify information. This study aims to examine the phenomenon of digital and information literacy crises, analyze the factors contributing to the low ability of society to filter information, identify the impacts of disinformation on national life, and explore efforts to strengthen digital literacy, particularly among the younger generation. This study employed a survey and observation approach by distributing questionnaires to 31 students at the University of Lampung. The results indicate that most respondents recognize the importance of digital literacy, social media ethics, and the ability to verify information. A total of 64.5% of respondents considered the implementation of firm and fair legal regulations to be the primary measure for creating a healthy digital environment. Furthermore, 48.4% of respondents stated that digital literacy materials are very important to be included in university curricula. The findings also show that false information can influence public trust in the government, trigger social conflicts, and weaken the implementation of Pancasila values, particularly the second and third principles. Sensational and emotional headlines were identified as one of the factors that encourage people to disseminate information without verifying it first. Strengthening digital literacy can be carried out through digital ethics education, critical thinking practices, the internalization of Pancasila values, digital literacy training, and collaboration among the government, educational institutions, families, communities, and social media platforms. Strong digital literacy is expected to foster citizens who are critical, wise, responsible, and capable of maintaining national unity, democracy, and national resilience in the digital era.

Keywords: *digital literacy, disinformation, hoax, Pancasila, citizenship, digital era.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, menyebarkan, dan menerima informasi. Kehadiran media sosial dan internet membuat arus informasi bergerak sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan persoalan baru berupa krisis literasi digital dan informasi. Masyarakat tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus memiliki kemampuan memahami, memilah, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi secara kritis. Rendahnya kemampuan literasi digital menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta manipulasi informasi yang tersebar luas di media sosial (Tambunan dkk., 2026).

Fenomena krisis literasi digital semakin terlihat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penyebaran hoaks meningkat pada berbagai momentum penting, seperti pandemi COVID-19, pemilu, maupun isu sosial-politik lainnya. Informasi palsu yang beredar melalui WhatsApp, TikTok, Instagram, dan Facebook sering kali diterima serta disebarkan kembali tanpa proses pengecekan fakta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya penggunaan teknologi belum diimbangi dengan kemampuan literasi digital masyarakat yang memadai (Sanggarwati dkk., 2025). Rendahnya kemampuan berpikir kritis menjadi faktor utama cepatnya penyebaran disinformasi di masyarakat digital.

Krisis literasi digital juga memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial dan demokrasi. Disinformasi dapat memicu konflik sosial, polarisasi masyarakat, hingga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun media. Selain itu, algoritma media sosial yang menampilkan informasi berdasarkan preferensi pengguna dapat menciptakan ruang gema informasi (*echo chamber*) yang memperkuat bias dan mempersempit sudut pandang masyarakat.

Di kalangan remaja dan mahasiswa, krisis literasi digital menjadi persoalan yang cukup serius karena kelompok usia muda merupakan pengguna internet terbesar di Indonesia. Banyak pengguna media sosial yang lebih cepat membagikan informasi dibandingkan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran terhadap bahaya hoaks menyebabkan generasi muda rentan menjadi korban maupun penyebar disinformasi (Humairoh & Nurjannah, 2025). Oleh sebab itu, penguatan literasi digital melalui pendidikan, pelatihan, dan pembiasaan berpikir kritis menjadi sangat penting agar masyarakat mampu menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Berdasarkan fenomena tersebut, krisis literasi digital dan informasi merupakan isu yang mendesak untuk dikaji lebih lanjut. Penguatan literasi digital diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang kritis, cerdas, serta mampu menghadapi tantangan penyebaran informasi palsu di era digital saat ini.

Urgensi Isu dalam Konteks Kebangsaan

Krisis literasi digital dan informasi menjadi isu yang sangat penting dalam konteks kebangsaan karena berkaitan langsung dengan persatuan, stabilitas sosial, dan ketahanan nasional. Penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta

provokasi di media digital dapat memicu konflik antarkelompok masyarakat, memperkuat polarisasi, dan mengganggu keharmonisan sosial di Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi digital yang baik, maka informasi palsu dapat dengan mudah memengaruhi opini publik dan menimbulkan perpecahan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks demokrasi, rendahnya literasi digital juga berpotensi mengancam kualitas partisipasi masyarakat. Informasi yang tidak valid sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, terutama pada masa pemilu atau isu nasional yang sensitif. Kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, media, maupun lembaga negara. Akibatnya, stabilitas nasional dapat terganggu karena masyarakat lebih mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Oleh sebab itu, kemampuan masyarakat dalam memverifikasi dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan demokrasi Indonesia.

Selain itu, urgensi penguatan literasi digital dalam konteks kebangsaan juga berkaitan dengan pembentukan karakter generasi muda. Generasi muda sebagai pengguna internet terbesar memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan bangsa di masa depan. Jika generasi muda tidak dibekali kemampuan berpikir kritis dan etika bermedia, maka mereka rentan terpapar paham radikalisme, intoleransi, maupun budaya digital yang negatif (Humairoh & Nurjannah, 2025). Sebaliknya, literasi digital yang baik dapat membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, dan mampu menggunakan teknologi untuk hal-hal yang produktif serta mendukung kemajuan bangsa. Dengan demikian, penguatan literasi digital dan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi kebutuhan nasional. Upaya tersebut penting untuk menjaga persatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas demokrasi, serta menciptakan masyarakat Indonesia yang bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi dan arus informasi di era digital.

Tinjauan Pustaka

Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi digital secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab, bukan sekadar kemampuan mengoperasikan internet atau perangkat digital (Salsabila dkk., 2025). Literasi digital mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara efektif. Seiring perkembangan teknologi, konsep literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, menciptakan informasi, serta memahami etika dan keamanan dalam ruang digital. Oleh karena itu, literasi digital dibagi ke dalam empat pilar utama, yaitu keterampilan digital (*digital skills*), etika digital (*digital ethics*), budaya digital (*digital culture*), dan keamanan digital (*digital safety*). Keempat pilar tersebut menjadi dasar penting dalam membentuk masyarakat yang mampu menggunakan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan literasi digital menjadi semakin penting karena masyarakat saat ini tidak hanya menghadapi kemudahan akses informasi, tetapi juga berbagai bentuk penyebaran informasi yang menyesatkan di ruang digital. Bentuk informasi tersebut meliputi misinformasi, disinformasi, hoaks, dan malinformasi (Salsabila dkk., 2025). Misinformasi merupakan informasi yang tidak benar atau kurang akurat yang tersebar tanpa unsur kesengajaan, sedangkan disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu atau memengaruhi opini publik. Hoaks merupakan informasi palsu yang dikemas seolah-olah benar untuk memancing respons masyarakat, sementara malinformasi adalah informasi yang sebenarnya benar, tetapi disebarkan untuk merugikan pihak lain, seperti penyebaran data pribadi atau informasi privat. Penyebaran berbagai bentuk informasi tersebut semakin cepat melalui media sosial dan sering diperkuat oleh algoritma digital yang menciptakan filter *bubble* dan *echo chamber*. Kondisi ini membuat masyarakat perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan memahami etika dalam menggunakan media digital agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, konsep kewarganegaraan digital menjadi semakin relevan. Kewarganegaraan digital merupakan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi secara efektif, memahami dan menafsirkan informasi digital, serta berinteraksi secara bijak dan bertanggung jawab di ruang digital (Amalia dkk., 2025). Kewarganegaraan digital juga mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap persoalan etika digital, mengambil keputusan yang aman, serta menghargai orang lain dalam interaksi daring. Dengan demikian, kewarganegaraan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga membentuk perilaku warga digital yang aktif, etis, kritis, dan bertanggung jawab. Karakteristik tersebut terlihat melalui partisipasi aktif dalam diskusi daring, penerapan etika digital, kesadaran terhadap keamanan dan privasi data, serta kemampuan memilah informasi untuk menghindari hoaks dan disinformasi. Selain itu, kewarganegaraan digital juga mendorong terciptanya interaksi yang positif, inklusif, dan saling menghargai sehingga dapat membangun lingkungan digital yang aman, sehat, dan harmonis.

Teori atau Pendekatan yang Relevan

Teori *confirmation bias* menjelaskan kecenderungan individu untuk lebih mempercayai, menerima, dan mempertahankan informasi yang sesuai dengan keyakinan atau pandangan yang telah dimilikinya, sementara informasi yang bertentangan cenderung diabaikan atau ditolak (Ardi & Pradiri, 2021). Dalam konteks media sosial, kondisi ini semakin diperkuat oleh sistem algoritma digital yang terus menampilkan informasi berdasarkan preferensi dan aktivitas pengguna, seperti riwayat pencarian, klik, suka, komentar, maupun konten yang dibagikan. Akibatnya, pengguna media sosial lebih sering terpapar pada sudut pandang tertentu secara berulang sehingga ruang untuk melihat perspektif yang berbeda menjadi semakin terbatas. Situasi tersebut dapat memperkuat keyakinan yang sudah ada, mengurangi sikap kritis terhadap informasi, serta meningkatkan risiko penyebaran informasi yang bias dan menyesatkan di ruang digital.

Fenomena tersebut berkaitan erat dengan konsep *filter bubble* dan *echo chamber* yang menjelaskan bagaimana algoritma media sosial membatasi keberagaman informasi yang diterima pengguna. *Filter bubble* merupakan kondisi ketika pengguna lebih sering menerima informasi yang sesuai dengan minat, pandangan, atau keyakinannya karena sistem algoritma menyaring informasi yang berbeda atau bertentangan. Sementara itu, *echo chamber* menggambarkan situasi ketika individu lebih banyak berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa sehingga keyakinan yang dimiliki semakin diperkuat dan pendapat yang berbeda cenderung diabaikan. Dalam kondisi tersebut, pengguna media sosial cenderung menerima informasi yang seragam dan jarang menghadapi perspektif alternatif sehingga kemampuan berpikir kritis dapat menurun (Armanda dkk., 2025). Akibatnya, ruang diskusi yang sehat menjadi semakin terbatas dan potensi terjadinya polarisasi sosial maupun penyebaran informasi yang menyesatkan semakin meningkat.

Dalam perspektif yang lebih luas, kondisi tersebut dapat dipahami melalui teori konstruksi sosial media yang menjelaskan bahwa media digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk realitas sosial, cara berpikir, dan pandangan masyarakat terhadap suatu isu (Fathilah dkk., 2025). Dalam konteks ini, algoritma menjadi mekanisme penting yang menentukan informasi apa yang muncul, diprioritaskan, atau disembunyikan dari pengguna. Akibatnya, realitas sosial yang diterima masyarakat menjadi lebih tersegmentasi karena setiap individu memperoleh informasi yang berbeda sesuai preferensi dan aktivitas digitalnya. Kondisi tersebut dapat memperkuat stereotip, membentuk *filter bubble* dan *echo chamber*, serta memengaruhi cara masyarakat memahami isu publik. Selain itu, algoritma juga memengaruhi pola interaksi sosial, pembentukan opini publik, hingga relasi kuasa di ruang digital karena visibilitas informasi sangat ditentukan oleh logika platform dan popularitas konten. Dengan demikian, media digital dan algoritma tidak hanya memengaruhi arus informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk pengetahuan, persepsi, dan realitas sosial masyarakat di era digital.

Hasil Penelitian Terdahulu

Kondisi kemampuan masyarakat dalam ruang digital Indonesia diukur melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Amiriyandi, 2025). Secara umum skor terus meningkat dari tahun 2022 hingga mencapai 44,53 poin pada 2025, namun capaian ini masih berada di bawah rata-rata ideal. Pengukuran ini mencakup empat pilar utama, di mana aspek infrastruktur & ekosistem mencapai angka tertinggi (53,06 poin), sedangkan pilar Pemberdayaan berada di posisi terendah (34,42 poin). Hal ini menunjukkan ketimpangan nyata: fasilitas teknologi sudah memadai, namun kemampuan masyarakat memanfaatkannya untuk kesejahteraan masih rendah.

Data lain menunjukkan bahwa Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2022 berada di angka 3,54 dari skala 5,00 (kategori sedang). Pilar Keamanan Digital tercatat sebagai skor terendah yaitu 3,12 poin. Hal ini membuktikan kemampuan teknis pengoperasian perangkat sudah tinggi, namun pemahaman perlindungan data dan

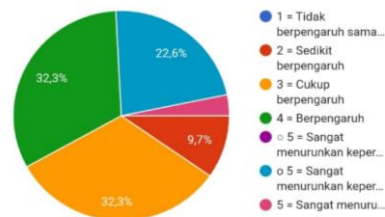
etika bermedia masih sangat lemah. Temuan ini selaras dengan data (2025) yang mencatat skor kompetensi digital sebesar 49,28 poin, mengonfirmasi bahwa kemajuan teknologi belum beriringan dengan kemampuan berpikir kritis masyarakat (Susanto, 2025).

Secara psikologis, penyebaran informasi erat kaitannya dengan mekanisme kognitif manusia. Fenomena bias konfirmasi (*confirmation bias*) menjadi pendorong utama peredaran berita palsu, di mana individu cenderung menerima informasi yang sesuai pandangan dirinya dan menolak hal berbeda. Kondisi ini diperberat oleh beban kognitif, sehingga tahap verifikasi fakta sering kali terabaikan (Hutahaeen dkk., 2025). Kondisi tersebut sangat tampak pada perilaku Generasi Z. Sebanyak 98,6% responden sadar akan keberadaan hoaks, namun hanya 64% yang yakin mampu menilai kredibilitas informasi (Maryani & Wulandari, 2025). Penyebaran utama terjadi melalui WhatsApp (44,6%) dan TikTok (33,8%). Tanpa literasi memadai, generasi ini berisiko terpapar misinformasi yang memengaruhi pandangan sosial maupun politik.

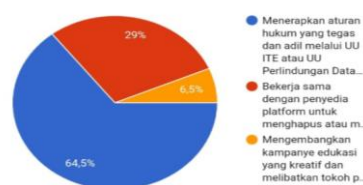


Dalam konteks bernegara, bahwa media sosial dimanfaatkan terstruktur melalui akun palsu untuk memanipulasi opini publik hingga 54,55% (Nurdin, 2025). Dampak langsungnya berupa penurunan kepercayaan publik sebesar 33,77% terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Setiap platform memiliki karakteristik dampak berbeda, di mana algoritma menciptakan ruang gema (*echo chamber*) yang mempertajam polarisasi sosial, khususnya pada platform X/Twitter dengan tingkat manipulasi mencapai 58%. Selain itu, peran buzzer dan influencer politik kini bertindak sebagai pembentuk narasi publik alternatif. Dengan mengeksploitasi emosi masyarakat, isu strategis dialihkan menjadi konflik horizontal. Fenomena ini membuktikan bahwa rendahnya literasi digital bukan sekadar masalah individu, melainkan ancaman terstruktur yang berpotensi merusak integrasi sosial dan persatuan bangsa.

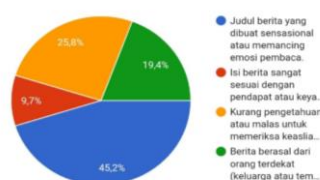
Hasil Observasi: Krisis Literasi Digital dan Disinformasi di Universitas Lampung



Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 31 responden, diperoleh data mengenai pandangan mahasiswa terhadap penyebaran informasi digital, hoaks, serta pentingnya literasi digital dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pemerintah dan pengelola media sosial memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman. Sebanyak 64,5% responden berpendapat bahwa penerapan aturan hukum yang tegas dan adil melalui UU ITE maupun perlindungan data pribadi merupakan langkah utama yang harus dilakukan. Selain itu, 29% responden memilih kerja sama antara pemerintah dan penyedia platform digital untuk menghapus konten negatif atau hoaks, sedangkan 6,5% responden menilai kampanye edukasi digital kreatif juga perlu dilakukan.

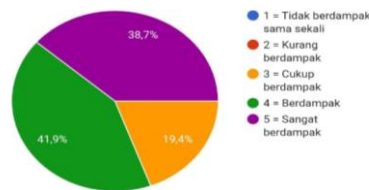


Dalam upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai etika dan literasi digital, hasil angket menunjukkan bahwa 35,5% responden memilih memasukkan materi etika digital ke dalam berbagai mata kuliah sebagai cara paling efektif. Persentase yang sama, yaitu 35,5%, juga memilih pelatihan praktik mengenai cara mengenali berita hoaks dan informasi palsu. Sementara itu, 22,6% responden memilih seminar atau webinar literasi digital, dan 6,5% lainnya memilih pembuatan konten edukasi oleh mahasiswa sendiri.

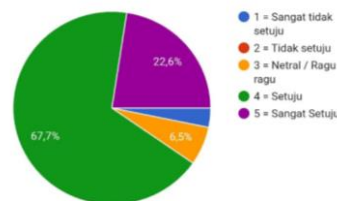


Terkait pentingnya materi literasi digital dimasukkan ke dalam kurikulum perkuliahan, mayoritas responden memberikan penilaian positif. Sebanyak 48,4% responden menyatakan bahwa materi tersebut sangat penting, 38,7% menyatakan penting, dan 12,9% menyatakan cukup penting. Data ini menunjukkan bahwa hampir

seluruh responden menyadari pentingnya pemahaman mengenai informasi digital, etika bermedia, dan keamanan data dalam dunia pendidikan tinggi.



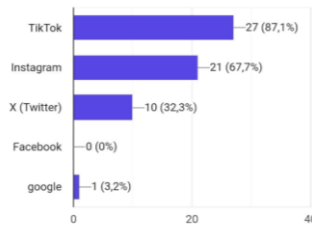
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa informasi palsu mengenai kinerja lembaga pemerintahan dinilai dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat negara. Sebanyak 32,3% responden menyatakan bahwa hoaks cukup berpengaruh, dan 32,3% lainnya menyatakan berpengaruh. Bahkan, 22,6% responden menilai bahwa hoaks sangat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Sementara itu, hanya sebagian kecil responden yang menganggap pengaruhnya rendah.



Mengenai dampak berita bohong bernuansa politik terhadap timbulnya konflik di masyarakat, sebanyak 41,9% responden menyatakan bahwa berita hoaks berdampak besar, sedangkan 38,7% menyatakan sangat berdampak. Adapun 19,4% responden menilai cukup berdampak. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari bahwa penyebaran berita palsu di media sosial dapat memicu perpecahan sosial dan konflik di tengah masyarakat.

Selain itu, sebagian besar responden juga sepakat bahwa maraknya penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian dapat melemahkan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-2 dan sila ke-3. Sebanyak 67,7% responden menyatakan setuju dan 22,6% menyatakan sangat setuju. Sementara itu, 6,5% responden bersikap netral, dan hanya sebagian kecil yang tidak setuju.

Berdasarkan hasil angket mengenai faktor yang menyebabkan seseorang menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu, sebanyak 45,2% responden menilai bahwa judul berita yang sensasional dan memancing emosi menjadi faktor utama. Selain itu, 25,8% responden menyatakan kurangnya pengetahuan atau rasa malas untuk memeriksa keaslian berita menjadi penyebab lainnya. Sebanyak 19,4% responden menyebut pengaruh informasi dari orang terdekat, sedangkan 9,7% responden menilai isi berita yang sesuai dengan pendapat pribadi juga memengaruhi seseorang untuk langsung menyebarkan informasi.



Dalam menghadapi berita yang menarik perhatian atau mengandung unsur kontroversi di media sosial maupun grup percakapan, sebagian besar responden menunjukkan sikap yang cukup bijak. Sebanyak 45,2% responden memilih hanya membaca berita tanpa langsung membagikannya, sedangkan 41,9% responden memilih mengecek kebenaran informasi terlebih dahulu melalui sumber lain. Di sisi lain, 9,7% responden memilih mengabaikan berita tersebut, dan hanya sebagian kecil yang langsung menyebarkan informasi kepada orang lain.



Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas responden masih cukup sering menemukan informasi yang dicurigai sebagai hoaks dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 48,4% responden menyatakan kadang-kadang menemukan hoaks, 16,1% menyatakan sering, dan 9,7% menyatakan sangat sering. Sementara itu, 22,6% responden menyatakan jarang menemukan hoaks dan hanya sebagian kecil yang tidak pernah menemukannya.

Adapun media sosial yang paling sering digunakan responden sebagai sumber informasi dan berita sehari-hari adalah TikTok dengan persentase sebesar 87,1%. Selanjutnya, Instagram digunakan oleh 67,7% responden, X (Twitter) sebesar 32,3%, dan Google sebesar 3,2%. Sementara itu, tidak ada responden yang memilih Facebook sebagai sumber utama informasi. Data ini menunjukkan bahwa media sosial berbasis video singkat dan visual menjadi sumber informasi yang paling dominan di kalangan responden.

penelitian ini melibatkan 31 responden yang berasal dari berbagai angkatan dan program studi. Mayoritas responden berasal dari angkatan 2025 dengan persentase sebesar 90,3%, sedangkan responden dari angkatan 2024 sebesar 9,7%. Data tersebut menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh mahasiswa angkatan terbaru.

Dilihat dari program studi, responden berasal dari berbagai jurusan yang berbeda. Program studi PPSI menjadi program studi dengan jumlah responden terbanyak, yaitu sebanyak 16 responden atau 51,6%. Selain itu, terdapat 5 responden atau 16,1% dari program studi lain yang masih berkaitan dengan bidang pendidikan bahasa. Sementara program studi lainnya seperti Arsitektur, Kehutanan, PGSD, Teknik, Akuntansi, dan beberapa program studi lain masing-masing diwakili oleh 1 responden atau sekitar 3,2%. Keberagaman program studi ini menunjukkan bahwa penelitian melibatkan responden dengan latar belakang akademik yang cukup

beragam.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan observasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai fenomena krisis literasi digital, penyebaran hoaks dan disinformasi, serta urgensi penguatan literasi digital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis fenomena berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penyebaran angket. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber, seperti artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga terkait, serta sumber resmi mengenai literasi digital, disinformasi, kewarganegaraan digital, dan kehidupan demokrasi. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai dasar dalam membangun kajian konseptual dan menganalisis dampak disinformasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Observasi dilakukan melalui penyebaran angket kepada 31 mahasiswa Universitas Lampung yang berasal dari berbagai angkatan dan program studi. Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai pengalaman dan pandangan responden terhadap penyebaran hoaks, penggunaan media sosial sebagai sumber informasi, pentingnya literasi digital, dampak disinformasi terhadap kepercayaan masyarakat, serta keterkaitan berita bohong dengan persatuan dan nilai-nilai Pancasila. Responden dipilih berdasarkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam pengisian angket.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, studi literatur, dan angket. Data dari angket kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menghitung persentase jawaban responden. Hasil persentase digunakan untuk menggambarkan kecenderungan pandangan mahasiswa terhadap permasalahan literasi digital dan disinformasi. Data hasil angket disajikan dalam bentuk uraian dan persentase, kemudian dikaitkan dengan hasil kajian literatur untuk memperoleh pembahasan yang lebih komprehensif.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil kajian literatur dan data angket secara sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil penelitian dengan konsep literasi digital, kewarganegaraan digital, *confirmation bias*, *filter bubble*, *echo chamber*, serta nilai-nilai Pancasila. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan alternatif strategi dan solusi dalam memperkuat literasi digital masyarakat, khususnya generasi muda.

Temuan dan Pembahasan

Analisis Kritis terhadap Masalah

Krisis literasi digital menjadi salah satu tantangan dalam perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Perkembangan media sosial membuat

masyarakat dapat dengan mudah menerima dan menyebarkan informasi tanpa adanya penyaringan yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, *cyberbullying*, dan pelanggaran etika dalam bermedia sosial. Rendahnya kemampuan literasi digital menyebabkan banyak pengguna media sosial belum mampu memilah informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Selain itu, lemahnya kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman mengenai etika komunikasi digital juga memperburuk krisis informasi di ruang digital (Az-zahra, 2025).

Media sosial tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang menyesatkan apabila tidak digunakan secara bijak. Banyak masyarakat lebih mudah mempercayai informasi yang bersifat sensasional tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya, ruang digital sering dipenuhi konflik, perdebatan, dan penyebaran kebencian yang dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis dan etika bermedia sosial menjadi hal yang penting dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Selain itu, literasi digital juga berpengaruh terhadap perkembangan wawasan kebangsaan mahasiswa. Kemampuan literasi digital membantu mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menyaring informasi yang diperoleh dari media digital. Mahasiswa yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih mampu memahami nilai-nilai kebangsaan, memiliki sikap kritis terhadap informasi, serta tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu atau informasi provokatif. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat menyebabkan generasi muda lebih mudah menerima informasi tanpa proses analisis yang baik.

Perkembangan teknologi digital perlu diimbangi dengan kemampuan menggunakan media secara bijak dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami informasi secara kritis dan etis. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat khususnya generasi muda dapat memanfaatkan media digital secara positif untuk mendukung pembelajaran, memperluas wawasan kebangsaan, dan meningkatkan kualitas partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Nurfauziyanti dkk., 2022).

Keterkaitan dengan Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan

Krisis literasi digital dan disinformasi memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan kewarganegaraan. Perkembangan media sosial yang tidak disertai kemampuan literasi digital yang baik dapat memunculkan berbagai pelanggaran etika dalam ruang digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, *cyberbullying*, dan provokasi. Kondisi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat merugikan orang lain dan menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penyebaran disinformasi juga bertentangan dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia karena informasi yang bersifat provokatif dapat memicu perpecahan di tengah keberagaman

masyarakat Indonesia (Az-zahra, 2025).

Nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman dalam penggunaan media digital secara etis dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan kewarganegaraan, masyarakat tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus memiliki sikap bijak, kritis, dan bertanggung jawab terhadap informasi yang diterima maupun disebar. Kemampuan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat menjaga sikap saling menghargai, toleransi, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi penting untuk membentuk karakter warga negara yang mampu menggunakan media sosial secara positif dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, literasi digital juga berkaitan dengan perkembangan wawasan kebangsaan mahasiswa. Kemampuan memahami, menganalisis, dan menyaring informasi dari media digital dapat membantu generasi muda memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai nilai nasionalisme, persatuan, dan kehidupan demokrasi. Mahasiswa yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih kritis terhadap informasi serta lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat membuat generasi muda lebih mudah terpengaruh oleh informasi palsu maupun provokatif yang dapat melemahkan rasa persatuan dan wawasan kebangsaan.

Dalam konteks kewarganegaraan, penggunaan media digital secara bijak merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami etika komunikasi, menghargai perbedaan pendapat, dan menjaga persatuan dalam kehidupan masyarakat. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi positif, memperkuat nilai kebangsaan, dan mendukung kehidupan demokrasi yang sehat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Nurfauziyanti dkk., 2022).

Data dan Fakta yang Mendukung

Perkembangan teknologi digital di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Digital 2025: Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 220 juta pengguna dan sebagian besar masyarakat aktif menggunakan media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Tingginya penggunaan internet tersebut menunjukkan bahwa media digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang komunikasi, pendidikan, ekonomi, maupun politik. Kondisi ini memperkuat pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat Indonesia sangat bergantung pada media digital dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, perkembangan teknologi yang cepat tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan literasi digital masyarakat yang memadai sehingga risiko penyebaran disinformasi menjadi semakin besar (Kemp, 2025).

Rendahnya literasi digital dapat terlihat dari masih tingginya penyebaran hoaks dan informasi palsu di media sosial. Masyarakat sering kali menerima dan

membagikan informasi tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. Kondisi tersebut menyebabkan berita bohong dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan. Fakta ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya mengenai rendahnya kemampuan berpikir kritis masyarakat dalam menghadapi arus informasi digital. Selain itu, berita yang bersifat provokatif dan sensasional cenderung lebih mudah menarik perhatian pengguna media sosial dibandingkan informasi yang bersifat faktual sehingga disinformasi lebih cepat berkembang di ruang digital (Ardi dkk., 2023).

Di kalangan generasi muda, penggunaan internet juga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), kelompok usia remaja dan mahasiswa menjadi pengguna internet terbesar di Indonesia. Tingginya intensitas penggunaan media sosial membuat generasi muda lebih sering terpapar berbagai jenis informasi digital setiap hari. Akan tetapi, tidak semua pengguna memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan yang menyesatkan. Kondisi tersebut memperkuat pembahasan sebelumnya bahwa generasi muda menjadi kelompok yang rentan terpengaruh hoaks, ujaran kebencian, maupun propaganda digital apabila tidak memiliki kemampuan literasi digital yang baik (APJII, 2024).

Selain penyebaran hoaks, media sosial juga memunculkan fenomena *echo chamber* dan polarisasi sosial. Algoritma media sosial cenderung menampilkan informasi yang sesuai dengan pandangan dan preferensi pengguna sehingga individu lebih sering menerima informasi yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Akibatnya, masyarakat jarang menerima sudut pandang yang berbeda dan akhirnya memperkuat polarisasi dalam kehidupan sosial maupun politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa disinformasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memengaruhi persatuan masyarakat dan kualitas demokrasi. Hal ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya mengenai pentingnya menjaga nilai persatuan, toleransi, dan kehidupan demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Khairina dkk., 2022).

Penyebaran disinformasi juga berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi palsu yang tersebar di media sosial dapat memicu konflik sosial, menimbulkan perpecahan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Rendahnya literasi digital juga dapat meningkatkan risiko penyebaran ujaran kebencian dan perilaku negatif di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis literasi digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas sosial, persatuan bangsa, dan ketahanan nasional. Fakta ini memperkuat pembahasan sebelumnya bahwa penggunaan media digital secara tidak bijak dapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan dan persatuan Indonesia (Siregar, 2023).

Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami etika bermedia sosial, serta memverifikasi informasi secara bertanggung

jawab. Dengan kemampuan literasi digital yang baik, masyarakat dapat menggunakan media digital secara bijak, menghindari penyebaran hoaks, serta menjaga persatuan dan ketahanan nasional di era digital saat ini.

Alternatif Strategi dan Solusi

Untuk menghadapi tantangan disinformasi dan rendahnya literasi digital, diperlukan strategi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari individu, keluarga, sekolah, hingga pemerintah. Upaya ini penting dilakukan agar masyarakat mampu menggunakan media digital secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Misalnya, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi sebelum menyebarkannya di media sosial. Selain itu, pengguna media sosial juga harus lebih berhati-hati dalam memberikan komentar agar tidak menimbulkan ujaran kebencian maupun konflik di ruang digital.

Strategi pertama adalah penguatan pendidikan etika dan literasi digital. Pendidikan menjadi dasar utama dalam membentuk warga digital yang cerdas dan beretika (Nazarina dkk., 2025). Literasi digital tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, serta memahami etika dalam bermedia sosial (Hidayat, 2025). Oleh karena itu, pendidikan literasi digital perlu diterapkan dalam proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Selain itu, isu-isu digital seperti disinformasi, ujaran kebencian, *cyberbullying*, dan keamanan data juga perlu diperkenalkan kepada peserta didik agar mereka lebih siap menghadapi tantangan di era digital.

Contohnya, guru dapat memberikan tugas kepada siswa untuk membandingkan berita dari beberapa sumber media dan mencari mana informasi yang benar serta mana yang termasuk hoaks. Kegiatan tersebut dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyaring informasi. Selain itu, sekolah juga dapat mengadakan seminar literasi digital atau sosialisasi mengenai bahaya *cyberbullying* dan penyebaran hoaks di media sosial. Pendidikan etika digital sebaiknya diterapkan melalui pendekatan *Whole School Digital Citizenship*. Pendekatan ini menempatkan etika digital sebagai bagian dari seluruh mata pelajaran, tidak hanya dalam PKN (Hidayat, 2025). Misalnya, pada pelajaran Bahasa Indonesia siswa diajarkan etika komunikasi publik, sedangkan pada pelajaran Informatika siswa mempelajari keamanan digital dan penggunaan media sosial yang aman. Contoh penerapannya adalah siswa diajarkan cara membuat komentar yang sopan di media sosial, memahami bahaya membagikan data pribadi di internet, serta belajar menggunakan teknologi digital untuk kegiatan positif seperti membuat konten edukasi.

Strategi kedua adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika digital. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman moral bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial. Sila pertama mengajarkan sikap saling menghormati antarumat beragama dan menghindari penyebaran konten yang menyinggung keyakinan orang lain. Sila kedua mengajarkan sikap kemanusiaan, empati, serta menolak *cyberbullying* dan ujaran kebencian. Sila ketiga menanamkan pentingnya

menjaga persatuan bangsa dan tidak menggunakan media sosial sebagai alat penyebar konflik maupun provokasi. Selain itu, sila keempat dan kelima mengajarkan masyarakat untuk menggunakan kebebasan berpendapat secara bijak serta memanfaatkan teknologi demi kepentingan bersama.

Contohnya, di era digital dapat dilakukan melalui pembuatan konten edukatif dan menarik yang mengangkat nilai kebangsaan secara kreatif, seperti meme, video pendek, poster digital, atau infografis yang mudah dipahami generasi muda. Selain itu, kampanye media sosial interaktif seperti kuis, diskusi daring, maupun tantangan positif juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga etika digital dan persatuan bangsa. Kolaborasi dengan *influencer* atau tokoh muda di media sosial juga dapat membantu menyebarkan pesan-pesan positif kepada masyarakat luas (Amalia dkk., 2025).

Strategi ketiga adalah penguatan kebijakan dan ekosistem digital nasional. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang aman melalui regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, regulasi tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang adil dan edukasi masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran hoaks dan memperluas program literasi digital, seperti program Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia “Cakap Digital” yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak.

Contoh penerapan strategi ini adalah pemerintah bekerja sama dengan platform media sosial untuk menandai informasi palsu atau menghapus konten yang mengandung ujaran kebencian dan hoaks. Selain itu, pemerintah juga dapat mengadakan pelatihan literasi digital bagi guru, mahasiswa, dan masyarakat umum melalui webinar maupun seminar (Siregar & Manurung, 2023). Dengan adanya kebijakan dan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya menjaga etika dalam menggunakan media digital. Selain itu, implementasi pendidikan etika digital juga perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penguatan literasi digital harus dilakukan pada tiga level, yaitu kurikulum pendidikan, komunitas, dan kebijakan publik. Pada level sekolah, literasi digital perlu diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran.

Pada level komunitas, orang tua dan masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan penggunaan media sosial. Sementara itu, pada level kebijakan publik, pemerintah dan platform media sosial perlu bekerja sama menciptakan ruang digital yang aman dan sehat. Keberhasilan penguatan etika dan literasi digital dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengenali hoaks, menurunnya kasus *cyberbullying* dan ujaran kebencian, serta meningkatnya sikap kritis dalam menggunakan media sosial. Dengan adanya penguatan literasi digital, masyarakat diharapkan mampu menjadi warga negara yang lebih bijak, bertanggung jawab, dan mampu menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital (Ati dkk., 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa krisis literasi digital di Indonesia terjadi akibat pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial yang tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam menyaring serta memverifikasi informasi secara kritis. Kondisi tersebut menyebabkan penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk pelanggaran etika digital semakin mudah terjadi di tengah masyarakat. Rendahnya literasi digital dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kemampuan berpikir kritis, rendahnya kesadaran dalam memeriksa fakta, pengaruh algoritma media sosial yang menciptakan *echo chamber* dan filter *bubble*, serta lemahnya pemahaman mengenai etika komunikasi digital. Selain itu, masyarakat cenderung lebih mudah mempercayai informasi yang sensasional tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Penyebaran hoaks dan disinformasi memberikan dampak besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti munculnya konflik sosial, polarisasi masyarakat, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara, serta terganggunya persatuan dan stabilitas nasional. Fenomena tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan dan persatuan Indonesia. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga demokrasi, persatuan bangsa, dan ketahanan nasional. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami etika digital, serta bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Dengan literasi digital yang baik, masyarakat dapat menjadi warga digital yang cerdas, bijak, dan mampu menghadapi arus informasi di era digital.

Upaya peningkatan literasi digital dapat dilakukan melalui pendidikan etika digital di sekolah, pembiasaan berpikir kritis, internalisasi nilai-nilai Pancasila, pelatihan literasi digital, serta kerja sama antara pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan platform media sosial dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat. Dengan langkah tersebut, masyarakat diharapkan mampu menggunakan media digital secara positif, bertanggung jawab, dan mendukung kehidupan bermasyarakat serta bernegara yang harmonis.

Referensi

- Amalia, R. A., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Kewarganegaraan Digital Sebagai Upaya Persiapan Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi. *Jurnal ICJ*, 2(1), 15–33. <https://doi.org/10.21512/icj.v2i1.12262>
- Amiriyandi. (2025, Oktober 2). *IMDI 2025 Naik ke 44,53, Indonesia makin Cakap Digital*. KOMDIGI. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/imdi-2025-naik-ke-4453-indonesia-makin-cakap-digital>
- APJII. (2024, Februari 7). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. APJII: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Ardi, R., & Pradiri, P. A. (2021). Determinant factors of partisans' confirmation bias in social media. *Humanitas Indonesian Psychological Journal*, 18(1), 1–13.

- <https://doi.org/10.26555/humanitas.v18i1.1966>
- Armanda, M. D., Afaf, D., & Krisdahyanto, R. (2025). Filter Bubble dan Echo Chamber: Pengaruh Algoritma Media Sosial terhadap Pola Konsumsi Informasi Mahasiswa Universitas Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 02(04), 1124–1129. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2669>
- Ati, M. R., Rhangga, A., Anggraini, P., Syahputra, E. H., & Mawardi, I. (2023). Literasi Digital sebagai Upaya Kritis Memrangi Berita Bohong: Studi Terhadap Gerakan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). *KOMUNIKA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 145–153. <https://doi.org/10.22236/komunika.v10i2.10756>
- Az-zahra, F. (2025). Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi Informasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 327–338. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2>
- Fathilah, A. S., Fitrayani, A., & Bahtiar, S. (2025). Konstruksi Realitas Sosial melalui Algoritma Media Digital dalam Perspektif Ilmu Sosial Modern Indonesia. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(4), 174–182. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i4.453>
- Hidayat, N. (2025). Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 105–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10183>
- Humairoh, A., & Nurjannah, A. (2025). MODERASI KONTEN DAN LITERASI DIGITAL: TANTANGAN KOMUNIKASI PUBLIK DI ERA DISINFORMASI DI INDONESIA. *Jurnal Central Publisher*, 2(12), 2891–2898. <https://doi.org/https://doi.org/10.60145/jcp.v2i12.566>
- Hutahaeen, H. S. E., Pertiwi, W. Y., & Muminin, A. (2025). Hoaks dan Pikiran Manusia: Sebuah Analisis Psikologi Kognitif. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(5), 691–692. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i5.3385>
- Kemp, S. (2025, Februari 25). *Digital 2025: Indonesia*. DATAREPORTAL. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
- Susanto, L. (2025, November 21). *Komdigi Gandeng Tiktok hingga Muslimat NU Gencarkan Literasi Digital*. katadata. https://katadata.co.id/digital/teknologi/69206496b226c/komdigi-gandeng-tiktok-hingga-muslimat-nu-gencarkan-literasi-digital?need_sec_link=1&sec_link_scene=im
- Maryani, S., & Wulandari, R. R. (2025). ANALISIS KETERAMPILAN LITERASI MEMBACA DIGITAL GENERASI Z DALAM MENGIDENTIFIKASI BERITA HOAKS DI ERA DIGITAL. *Jurnal TEDC*, 19(1), 8–15. <https://doi.org/10.70428/tedc.v19i1.1173>
- Nazarina, A., Soebagio, J., Alexandre, R., & Yappy, F. (2025). PERAN PENDIDIKAN LITERASI DIGITAL DALAM BELA NEGARA: MENGATASI DISINFORMASI DAN POLARISASI DI ERA MEDIA SOSIAL. *PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 5(4), 1877–1887. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/paedagogy.v5i4.7754>
- Nurdin, R. (2025). TROLLS, DISINFORMASI, DAN STRATEGI KAMPANYE: TANTANGAN DEMOKRASI DIGITAL DALAM PEMILU 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(1), 1–26. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1350>
- Nurfauziyanti, F., Damanhuri, & Bahrudin, A. F. (2022). PENGARUH LITERASI DIGITAL TERHADAP PERKEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN MAHASISWA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 54–66.

<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.51067>

- Salsabila, F., Daviza, P. T., Istiqomah, K., Ibadillah, Z., Ikhsan, M., Iryani, E., & Asafri, H. (2025). Membangun Kecakapan Literasi Digital Di Era Disinformasi: Telaah Teoritis dan Implikasinya Pada Perguruan Tinggi. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(5), 7116–7135. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.10074>
- Sanggarwati, A. D., Lestari, S., & Hayati, C. (2025). Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Hoaks dan Disinformasi: Sosialisasi Literasi Media Digital di Kalangan Remaja. *Jurnal Ekonomi, Pendidikan, dan Pengabdian Masyarakat*, 2(22), 40–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.63200/jependimas.v2i2.43>
- Siregar, S. F., & Manurung, H. Y. (2023). Literasi Digital Sebagai Upaya Antisipasi Ujaran Kebencian di Media Sosial. *JURNAL SOMASI: Sosial Humaniora Komunikasi*, 4(1), 68–76. <https://doi.org/10.53695/js.v4i1.929>
- Tambunan, R., Pitri, A., Andalia, Maulana, M., & Nilfatri. (2026). Peningkatan Literasi Digital Masyarakat di Era Transformasi Teknologi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 19241–19251. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5233>